

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Identifikasi Masalah

Jumlah orang di seluruh dunia yang bertahan hidup di bawah garis kemiskinan sebesar 2,5 dolar PPP per hari turun dari 72 persen pada tahun 1990 menjadi 50 persen pada tahun 2010, dengan mayoritas masuk kedalam kategori rentan miskin. Menurut (*WorldBank*, 2014), hingga 89 persen masyarakat miskin yang berpenghasilan kurang dari 10 dolar PPP per hari. Meskipun ketimpangan global telah menurun, ketimpangan ekonomi antar negara telah meningkat selama 25 tahun terakhir (*WorldBank*, 2018).

Meningkatnya kesenjangan memberikan lebih banyak peluang terjadinya kejahatan dan terjadi hampir di semua aspek kehidupan (Kelly, 2000), terbatasnya pemanfaatan fasilitas kesehatan dapat menghambat pertumbuhan kognitif karena kelaparan, khususnya pada anak-anak, sedangkan akses yang tidak memadai terhadap sekolah formal menyebabkan disparitas dalam kualitas pendidikan, sehingga membuka jalan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mempelajari kompetensi tertentu dan memasuki pasar kerja bagi orang-orang kaya (Neckerman & Torche, 2007). Hal ini mengakibatkan semakin melebarnya kesenjangan antara masyarakat berpendapatan tinggi dan masyarakat berpendapatan rendah.

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia dan DKI Jakarta 2020-2022

Tahun	Angka Pertumbuhan Ekonomi	
	Indonesia	DKI Jakarta
2020	-2,07%	-2,36%
2021	3,70%	3,56%
2022	5,31%	5,25%

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Tabel 1.1 menggambarkan angka pertumbuhan ekonomi tahunan (*Year-over-Year*) untuk Indonesia dan DKI Jakarta dari tahun 2020 hingga

2022. Pada tahun 2020, Indonesia mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar -2,07% dan DKI Jakarta -2,36%. Namun, pada tahun 2021, ekonomi mulai pulih, dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 3,70% dan DKI Jakarta sebesar 3,56%. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Indonesia dan DKI Jakarta, masing-masing sebesar 5,31% dan 5,25%, yang mana paling tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

PDRB perkapita atas dasar harga berlaku (ADHB) Provinsi DKI Jakarta mencapai angka 24,86 juta rupiah, yang merupakan angka tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa DKI Jakarta memiliki PDRB perkapita tertinggi jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia (Databoks, 2023). Dengan kata lain, DKI Jakarta tidak hanya mengalami peningkatan PDRB perkapita yang signifikan pada tahun tersebut, tetapi juga menempati posisi teratas dalam perbandingan PDRB per kapita antar provinsi di Indonesia.

Tabel 1.2. Angka *Gini Ratio* di Indonesia dan DKI Jakarta tahun 2020-2022

Tahun	Angka <i>Gini Ratio</i>	
	Indonesia	DKI Jakarta
2020	0,385	0,400
2021	0,381	0,411
2022	0,381	0,412

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Tabel 1.2 menunjukkan *gini ratio* yang mengukur ketimpangan pendapatan, untuk Indonesia dan DKI Jakarta dari tahun 2020 hingga 2022. Pada tahun 2020, *gini ratio* Indonesia adalah 0,385, sementara DKI Jakarta memiliki rasio lebih tinggi yaitu 0,400, menandakan ketimpangan pendapatan yang lebih besar di Jakarta dibandingkan rata-rata nasional. Pada tahun 2021, *gini ratio* Indonesia sedikit menurun menjadi 0,381, menunjukkan perbaikan kecil dalam distribusi pendapatan, sedangkan DKI Jakarta mengalami peningkatan menjadi 0,411, menandakan ketimpangan yang memburuk. Pada tahun 2022, *gini ratio* Indonesia tetap stabil di 0,381, tetapi DKI Jakarta meningkat menjadi 0,412, angka ini paling tinggi dari tahun-tahun

sebelumnya. Dilihat dari (BPS, 2022) *gini ratio* Provinsi DKI Jakarta menempatkannya sebagai provinsi dengan *gini ratio* tertinggi kedua setelah Provinsi Gorontalo. Angka ini bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan *gini ratio* secara nasional. *Gini ratio* yang tinggi mengindikasikan tingkat ketimpangan yang signifikan dalam distribusi pendapatan di DKI Jakarta, mencerminkan disparitas ekonomi yang cukup mencolok di antara penduduk.

Kesenjangan gender dalam hal akses dan pengaruh terhadap pasokan, kekuatan keuangan, dan partisipasi politik terjadi di banyak tempat. Ketidakeimbangan ini merugikan banyak orang, dalam hal ini perempuan yang menanggung sebagian besar ketidakeimbangan (Subarto, 2018). Peningkatan kesetaraan gender dalam strategi pembangunan utama diharapkan dapat mencapai pembangunan inklusif yang memastikan tidak ada satupun yang tertinggal (Bappenas, 2017). Nilai GII (*Gender Inequality Index*) atau Indeks Ketimpangan Gender (IKG) yang semakin besar menunjukkan tingkat ketidaksetaraan gender yang besar pula, sedangkan nilai yang lebih rendah menunjukkan ketidaksetaraan yang lebih rendah (UNDP, 2020).

Tabel 1.3 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Indonesia dan DKI Jakarta tahun 2020-2022

Tahun	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	
	Indonesia	DKI Jakarta
2020	0,472	0,210
2021	0,465	0,194
2022	0,459	0,320

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Tabel 1.3 menunjukkan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) untuk Indonesia dan DKI Jakarta dari tahun 2020 hingga 2022. Pada tahun 2020, IKG Indonesia adalah 0,472, menunjukkan adanya ketimpangan gender yang relatif tinggi di tingkat nasional. DKI Jakarta memiliki IKG yang lebih rendah yaitu 0,210 pada tahun yang sama, menandakan ketimpangan gender yang lebih kecil di ibu kota. Pada tahun 2021, IKG Indonesia menurun menjadi

0,465, mencerminkan perbaikan dalam kesetaraan gender, sementara IKG DKI Jakarta turun tajam menjadi 0,194, menunjukkan kemajuan signifikan dalam mengurangi ketimpangan gender. Namun, pada tahun 2022, IKG Indonesia sedikit menurun lagi menjadi 0,459, tetapi masih menunjukkan ketimpangan gender yang lebih besar dibandingkan dengan DKI Jakarta, yang mengalami kenaikan menjadi 0,320, angka ini paling tinggi dari tahun-tahun sebelumnya di Provinsi DKI Jakarta. Menurut (BPS, 2022) dari 34 provinsi yang dicatat, 9 diantaranya mengalami peningkatan IKG pada tahun 2022. DKI Jakarta mencatatkan peningkatan terbesar dari 9 provinsi tersebut. Hal ini mengejutkan karena sejak 2018, DKI Jakarta sebelumnya mengalami penurunan terus-menerus dalam IKG hingga tahun 2021. Lonjakan ini menunjukkan adanya perubahan besar dalam ketidaksetaraan gender di DKI Jakarta.

Tabel 1.4 Pendapatan Rata-Rata Perkapita di Indonesia dan DKI Jakarta tahun 2020-2022

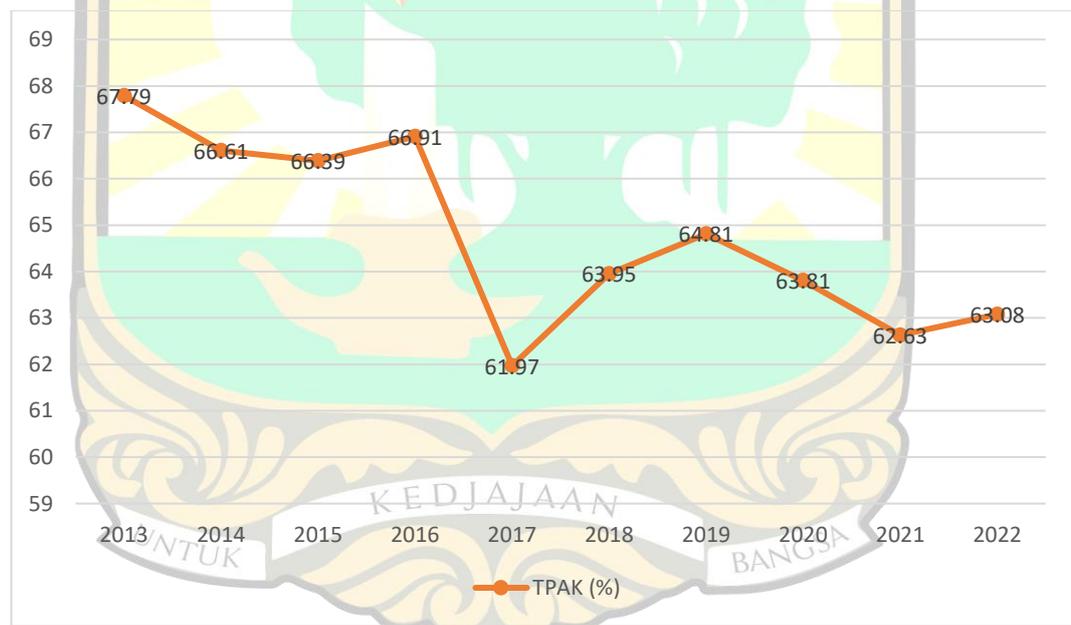
Tahun	Pendapatan Rata-Rata (Per Jam)	
	Indonesia	DKI Jakarta
2020	Rp17.542	Rp32.685
2021	Rp18.089	Rp30.662
2022	Rp17.696	Rp28.420

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Tabel 1.4 menunjukkan perbandingan pendapatan rata-rata per jam antara Indonesia dan DKI Jakarta dari tahun 2020 hingga 2022. Pada tahun 2020, pendapatan rata-rata per jam di Indonesia adalah Rp 17.542, sedangkan di DKI Jakarta mencapai Rp 32.685. Pada tahun 2021, pendapatan rata-rata per jam di Indonesia meningkat menjadi Rp 18.089, sementara di DKI Jakarta menurun menjadi Rp 30.662. Di tahun 2022, pendapatan rata-rata per jam di Indonesia turun menjadi Rp 17.696, dan di DKI Jakarta juga turun lebih lanjut menjadi Rp 28.420. Meskipun terjadi penurunan di Jakarta, pendapatan rata-rata per jam di provinsi ini tetap jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Meski demikian, Upah Minimum Provinsi (UMP) di DKI

Jakarta pada tahun 2022 tetap berada di posisi tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, mencapai Rp 4.641.854 per bulan. Tingginya UMP di Jakarta disebabkan oleh beberapa faktor utama. Sebagai ibu kota negara dan pusat ekonomi utama, Jakarta memiliki konsentrasi tinggi perusahaan besar dan industri, yang meningkatkan permintaan untuk tenaga kerja dengan keterampilan khusus. Selain itu, biaya hidup yang tinggi, termasuk harga perumahan, transportasi, dan kebutuhan sehari-hari, turut mempengaruhi penetapan UMP yang lebih tinggi.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memiliki dampak signifikan terhadap pendapatan tenaga kerja. Ketika TPAK meningkat, lebih banyak individu aktif dalam mencari pekerjaan atau sudah bekerja, yang dapat mempengaruhi persaingan di pasar kerja dan pada gilirannya berdampak pada tingkat upah.



Gambar 1.1 Analisis TPAK 2013-2022

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Gambar 1.1 menunjukkan persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari tahun 2013 hingga 2022, menguraikan perubahan dalam tingkat partisipasi angkatan kerja selama periode tersebut.

Pada tahun 2013, TPAK mencapai angka tertinggi yaitu 67,79%, menandakan proporsi angkatan kerja yang aktif di pasar tenaga kerja sangat tinggi pada tahun tersebut. Pada tahun 2014, TPAK sedikit menurun menjadi 66,61%,. Penurunan ini berlanjut pada tahun 2015, dengan TPAK mencapai 66,39%. Pada tahun 2016, TPAK mengalami sedikit peningkatan menjadi 66,91%. Namun, pada tahun 2017, TPAK turun signifikan menjadi 61,97%.

Tahun 2018 mencatat pemulihan dengan TPAK meningkat menjadi 63,95%. Tahun 2019 melanjutkan peningkatan dengan TPAK mencapai 64,81%. Pada tahun 2020, TPAK mengalami sedikit penurunan menjadi 63,81%. Penurunan ini berlanjut pada tahun 2021, dengan TPAK mencapai 62,63%. Pada tahun 2022, TPAK sedikit meningkat menjadi 63,08%. Meskipun tidak mencapai level tertinggi tahun 2013, angka ini mencerminkan upaya pemulihan dalam partisipasi angkatan kerja setelah masa-masa sulit.

Fluktuasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari tahun 2013 hingga 2022 di Provinsi DKI Jakarta berdampak langsung pada pendapatan tenaga kerja. Penurunan TPAK yang signifikan pada tahun 2017, serta dampak pandemi COVID-19 pada tahun 2020 dan 2021, menyebabkan penurunan pendapatan akibat berkurangnya kesempatan kerja dan meningkatnya persaingan. Meskipun terjadi pemulihan moderat pada akhir periode, fluktuasi TPAK tetap mempengaruhi pendapatan secara tidak merata, dengan potensi peningkatan pendapatan bergantung pada kecepatan dan cakupan pemulihan ekonomi di berbagai sektor.

Status perkawinan dapat menurunkan prospek perempuan untuk mendapatkan pekerjaan karena suami bekerja penuh waktu, sehingga mengurangi pilihan perempuan untuk bekerja paruh waktu saja sebaliknya, jika suami membantu istri bekerja penuh atau paruh waktu maka istri akan kehilangan pekerjaan. (Leppel, 2005). Seseorang yang telah menikah atau bercerai harus mencurahkan waktunya untuk tugas-tugas rumah tangga seperti mengasuh anak, mengurus rumah tangga, dan sebagainya guna mengurangi jam kerjanya. Akibatnya, uang tunai yang diperoleh berkurang karena berkurangnya jam kerja saat mengurus rumah tangga (Bowles & Park, 2004). Berdasarkan (BPS, 2022) angka perceraian di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 yaitu

15.947 pasangan, yang menjadikan provinsi ini sebagai provinsi nomor 5 paling tinggi angka perceraian di Indonesia.

5 SMA di Provinsi DKI Jakarta masuk menjadi top 10 nilai UTBK teratas di Indonesia pada tahun 2022 (LTMPT, 2023) yang menggambarkan kualitas SDM di DKI Jakarta sangat baik dibandingkan provinsi-provinsi lainnya. Pasal 31 Ayat 3 dan 4 UUD 1945 pendidikan di Indonesia adalah prioritas utama pemerintah, yang berkomitmen meningkatkan kualitas dan akses pendidikan demi kemajuan bangsa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Tenaga kerja yang berasimilasi dengan industri yang tidak diatur biasanya adalah mereka yang tidak berpengalaman atau kurang memiliki kemampuan tertentu, karena sektor tidak teratur dan tidak menuntut keterampilan ilmiah atau standar pendidikan yang tinggi dari tenaganya karena alat produksi yang digunakan relatif sederhana, begitupun sebaliknya (Yuharmi, 2017). Biasanya tenaga kerja yang memiliki pendapatan tinggi cenderung memperhatikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang artinya memiliki Tingkat Pendidikan yang tinggi.

Pengalaman kerja adalah lamanya seseorang dipekerjakan pada pekerjaan itu sejak ia diterima sampai saat ini (Martoyo, 2007). Semakin tinggi tingkat pendidikan dan pengalaman profesional tenaga kerja, semakin baik pula kinerja yang ditunjukkan. (Usman, 2011) yang didukung oleh temuan studi empiris (Zakso, 2010) yang menunjukkan bahwa pendidikan dan pengalaman kerja mempunyai pengaruh penting dan bermanfaat terhadap kinerja karyawan. (Foster, 2001) Menyatakan bahwa dimensi pengalaman kerja dapat dilihat pada rentang waktu atau lama bekerja, jumlah keahlian dan kemampuan yang dimiliki, serta jenis profesi.

Status pekerjaan adalah kedudukan yang dipegang oleh seseorang dalam melaksanakan pekerjaan pada bagian atau kegiatan suatu organisasi (Pertwi, 2015). Saat memperkirakan pekerja informal, BPS menggunakan teknik unik untuk mendefinisikan orang-orang yang bekerja di industri formal atau informal berdasarkan tempat kerja pada pekerjaan utama dan jenis pekerjaan atau jabatan (BPS, 2013).

Pada tahun ajaran 2022/2023, DKI Jakarta memiliki 8.067 unit sekolah. Dari jumlah tersebut, SMA Negeri mendominasi di antara 1.000 sekolah terbaik versi LTMPT, dengan tujuh sekolah berada di peringkat sepuluh besar. Sementara itu, tiga sekolah lainnya yang juga masuk dalam peringkat sepuluh besar adalah SMA Swasta, yaitu SMA Labschool Kebayoran, SMA Kanisius Jakarta, dan SMAS Kristen 5 BPK Penabur (Databoks, 2023).

Training atau pelatihan tenaga kerja di suatu perusahaan yaitu mengikuti bimbingan, konseling, atau pelatihan, baik yang diberikan oleh perusahaan maupun mitra. Pelatihan terutama ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan yang diperlukan, seperti pelatihan analisis pasar, metode produksi, perluasan pasar, dan taktik pemasaran, guna meningkatkan produktivitas perusahaan (Sulistiyani, 2004).

Menurut (Dewi & Saskara, 2020) jika tenaga kerja dapat melakukan pekerjaannya dengan cepat, mereka akan memiliki kesempatan untuk menyelesaikan hal-hal lain dan semakin banyak jam kerja mereka, semakin banyak pula uang yang mereka hasilkan. Menurut (Sumarsono, 2009), semakin banyak waktu yang dihabiskan di tempat kerja dikorbankan, semakin tinggi produktivitas dan pendapatan.

Menurut (Junker *et al* 2012) terdapat hubungan yang signifikan antara umur dan pendapatan sepanjang umur produktif dari 15 sampai dengan 65 tahun. Hal ini mengartikan bahwasannya semakin dewasa seseorang maka akan semakin tinggi penghasilannya seiring dengan semakin banyaknya pengalaman. Menurut (Aprilia, 2019) umur merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan seseorang.

Penelitian ini didasari oleh situasi ekonomi yang menonjol di DKI Jakarta pada tahun 2022. PDRB Perkapita berdasarkan harga berlaku (ADHB) Provinsi DKI Jakarta adalah 24.86 juta yang mana paling tinggi se-Indonesia, dan juga pertumbuhan ekonomi paling tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya di angka 5,25% tetapi DKI Jakarta menduduki peringkat kedua tertinggi dalam ketimpangan ekonomi di Indonesia dengan *gini ratio* mencapai 0,412, setelah Gorontalo. Ketimpangan gender di DKI Jakarta mencapai 0,320, angka ini paling tinggi dibanding provinsi lainnya di

Indonesia. Sehubungan dengan keadaan kompleksitas ekonomi dan sosial di ibu kota pada tahun 2022, bersamaan dengan keadaan TPAK yang fluktuatif sepuluh tahun belakangan dan beberapa variabel lainnya yaitu umur, status pekerjaan, jam kerja, pendidikan tertinggi, status perkawinan, pelatihan, instansi penyelenggara pendidikan, dan pengalaman penulis memilih untuk mengangkat judul penelitian “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Tenaga Kerja di Provinsi DKI Jakarta)”. Harapannya penelitian ini bisa memberikan tambahan ilmu lebih mendalam mengenai dinamika ekonomi dan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan tenaga kerja di tengah kompleksitas lingkungan ekonomi yang dinamis di Provinsi DKI Jakarta.

1.2 Rumusan Masalah

DKI Jakarta masih menjadi acuan utama bagi provinsi lain di Indonesia karena kehadiran banyak perusahaan besar, baik dari dalam negeri maupun multinasional yang menjadikan DKI Jakarta menarik sebagai objek penelitian, tetapi juga mencerminkan ketimpangan ekonomi yang tinggi. Meskipun terdapat segmen masyarakat yang menikmati tingkat kekayaan yang tinggi, terdapat juga kelompok yang masih berjuang dengan keterbatasan ekonomi. Selain itu, keberagaman dalam kualitas tenaga kerja di Jakarta menjadi perhatian serius, dengan adanya baik tenaga kerja berkualitas tinggi maupun yang kurang berkualitas, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu “faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan tenaga kerja Provinsi DKI Jakarta tahun 2022?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu “mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan tenaga kerja Provinsi DKI Jakarta tahun 2022”.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat penting, berikut adalah manfaat-manfaat tersebut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman teoritis tentang elemen-elemen yang mempengaruhi pendapatan tenaga kerja serta membuka jalan untuk penelitian tambahan mengenai ketidakmerataan pendapatan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Untuk mempersiapkan mahasiswa menerapkan apa yang telah mereka pelajari di perguruan tinggi ke dalam situasi dunia nyata.
- 2) Sebagai alat untuk memperluas pengetahuan dan informasi terkait dengan topik penelitian mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi pendapatan tenaga kerja.

b. Bagi Pemerintah

Menjadi umpan balik dan sumber pengambilan keputusan strategi dalam rangka peningkatan kualitas tenaga kerja.

c. Bagi Pembaca dan Masyarakat Umum

Temuan studi ini bertujuan untuk menjadi referensi tambahan bagi peneliti lain, panduan bagi masyarakat dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan tenaga kerja serta referensi untuk kajian-kajian seterusnya.